

MITIGASI PENGENDALIAN LAJU INFLASI PAPUA PEGUNUNGAN MELALUI KETERSEDIAAN KOMODITAS BAHAN PANGAN

Sumiyati Tuhuteru^{1,*}, Rein Edward Yohanes Rumbiak²

¹ Program Studi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balie Wamena

² Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balie Wamena

*Email: tuhuteru.umy@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan komoditas bahan pangan menjadi lumbung utama kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan secara global dan berperan dalam pengendalian inflasi suatu daerah. Saat ini Provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat inflasi sebesar 5,09% secara nasional dengan andil pengendali inflasi terbesar adalah kelompok makanan seperti beras dan cabai. Penelitian ini merupakan riset awal sebelum penelitian lanjutan dan bertujuan untuk memitigasi pengendalian inflasi dengan strategi menjaga ketersediaan komoditas bahan pangan di Provinsi Papua Pegunungan melalui kebijakan pemerintah daerah dan kerjasamanya dengan Bank Indonesia yang pada umumnya berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bentuk mitigasi pengendalian inflasi di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilakukan dengan menjaga ketersediaan komoditas bahan pangan melalui kebijakan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan *stakeholder*, perbankan dan juga akademisi dalam mengembangkan kluster komoditas bahan pangan di tiap desa, melakukan pengendalian produksi (prediksi) melalui penentuan waktu tanam komoditas yang dibudidayakan, melakukan operasi pasar dengan memperhatikan rantai pemasaran komoditas bahan pangan, menentukan batasan harga jual sehingga tidak ada lagi pedagang pengecer yang seenaknya menentukan harga jualnya dan melakukan pengembangan program kampung peduli Inflasi.

Kata kunci: Inflasi, komoditas, mitigasi, pangan, Papua Pegunungan, strategi

MITIGATION OF INFLATION RATE CONTROL IN MOUNTAINOUS PAPUA THROUGH THE AVAILABILITY OF FOOD COMMODITIES

ABSTRACT

The existence of food commodities is the main source of human life because it is directly related to global food security and plays a role in controlling inflation in a region. Currently, the Papua Mountains province has an inflation rate of 5.09% nationally with the largest inflation control share being food groups such as rice and chili. This study is initial research before further research and aims to mitigate inflation control with a strategy of maintaining the availability of food commodities in the Papua Mountains province through regional government policies and cooperation with Bank Indonesia which generally have an impact on the community and business actors. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out through literature studies. The results of the study show that the form of inflation control mitigation in the Papua Mountains Province can be carried out by maintaining the availability of food commodities through regional government policies that collaborate with stakeholders, banks and academics in developing food commodity clusters in each village, controlling production (predictions) by determining the planting time of cultivated commodities, conducting market operations by paying attention to the marketing chain of food commodities, determining selling price limits so that there are no more retailers who arbitrarily determine their selling prices and developing the Inflation Care Village program.

Keywords: Commodity, food, inflation, mitigation, Papua Mountains, strategy

PERNYATAAN KUNCI

- Keberadaan komoditas bahan pangan menjadi lumbung utama kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan secara global dan berperan dalam pengendalian inflasi suatu daerah.
- Saat ini Provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat inflasi sebesar 5,09% secara nasional dengan andil pengendali inflasi terbesar adalah kelompok komoditas bahan pangan strategis seperti beras, cabai dan bayam.
- Ketahanan pangan suatu daerah erat terkait dengan tingkat inflasinya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui penjagaan ketersediaan pasokan komoditas pangan oleh petani lokal di Provinsi Papua Pegunungan adalah:

1. Penyediaan basis data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di tiap desa;
2. Memanfaatkan Tim Satgas Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas ketahanan Pangan;
3. Menerapkan kegiatan ekonomi terpadu mulai dari ketersediaan pasokan bahan baku (benih, keterampilan dan pengetahuan petani), proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi;
4. Memberikan bantuan kepada kelompok tani dan peternak Provinsi Papua Pegunungan;
5. Memperhatikan bentuk pasar tradisional melalui pemutusan rantai pemasaran yang merugikan petani lokal atau yang dilakukan oleh pedagang pengecer yang melakukan permainan harga jual dan menekan harga beli di tingkat petani;
6. Menghadirkan badan pusat logistik di tiap desa; dan/atau
7. Pembatasan pemasaran komoditas dari luar Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menekan distribusi pemasaran komoditas bahan pangan lokal.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan suatu daerah erat terkait dengan tingkat inflasinya. Ini menunjukkan, berdasarkan data empiris (BPS 2024), bahwa pangan adalah penyebab utama inflasi di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi

negara sampai dengan individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU No. 18 2012). Karena itu, kebijakan program ketahanan pangan terkait erat dengan pengendalian inflasi (Yurianto 2020).

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi di desa, di tahun 2022 Kementerian Desa RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa. Pedoman tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah di desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengendalian inflasi di desa dengan membuat kebijakan kegiatan yang dapat didanai melalui dana desa yang difokuskan pada:

1. Penyediaan *data base* dan informasi tentang capaian produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan;
2. Kualitas dan kuantitas produksi komoditas di dalam desa, terutama pangan dan energi;
3. Kegiatan ekonomi terpadu dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, dan daur ulang limbah untuk kebutuhan energi;
4. Pengelolaan ketersediaan komoditas di desa, terutama pangan dan energi; dan
5. Bantuan kepada kelompok. Selain itu, program ketahanan pangan desa adalah salah satu program yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di desa.

Program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga desa memiliki cukup makanan dan memastikan bahwa desa tetap aman dari masalah ketersediaan pangan. Penyaluran dana desa diharapkan dapat mempercepat produksi pangan untuk mengurangi dampak inflasi dan mempertahankan daya beli warga desa. Ini diharapkan dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan pangan mandiri. Dimana terlihat sebesar 5,07% kelompok bahan pangan (makanan) memegang andil dalam inflasi Provinsi Papua Pegunungan. Diharapkan bahwa dana ini dapat membantu proses mulai dari awal produksi hingga pengolahan, penyediaan infrastruktur dan lahan penunjang, dan pemasaran.

Mitigasi Pengendalian Laju Inflasi Papua Pegunungan Melalui Ketersediaan Komoditas Bahan Pangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk mitigasi pengendalian inflasi di Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami tingkat inflasi nomor 1 nasional dengan menjaga ketersediaan komoditas bahan pangan di Provinsi Papua Pegunungan melalui kebijakan pemerintah daerah dan kerjasamanya dengan Bank Indonesia dalam pencegahan inflasi Provinsi Papua Pegunungan yang pada umumnya berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha.

SITUASI TERKINI

Ketahanan pangan global berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena meningkatnya jumlah populasi di seluruh dunia sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dengan

ketersediaan komoditas bahan pangan akibat lambatnya produktivitas tanaman pangan sehingga menyebabkan harga komoditas pertanian di seluruh dunia menanjak naik, seperti yang saat ini terjadi di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini terlihat dari data y-on-y Provinsi Papua Pegunungan pada Agustus tahun 2024 menunjukkan kelas pertama yang mengambil andil laju inflasi sebesar 5,09 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,78 (BPS 2024). Komoditas yang paling banyak memberikan andil atau sumbangan y-on-y terhadap inflasi adalah beras (0,43 %), cabai rawit (0,11 %), kopi bubuk (0,07 %), sigaret kretek mesin (0,12 %) dan emas (0,30 %) seperti yang terlihat pada Gambar 1 (BPS 2024).

Berita Resmi Statistik No. 150/08/94/Th. XXVII, 1 Agustus 2024

Month-to-Month (M-to-M)

DEFLASI 0,44%

Year-to-Date (Y-to-D)

INFLASI 4,42%

Year-on-Year (Y-on-Y)

INFLASI 5,09%

Andil Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) menurut Kelompok Pengeluaran



Makanan,
Minuman &
Tembakau



Pakaian &
Aks Kaki



Perumahan,
Air, Listrik &
Bahan Bakar Rumah
Tangga



Perlengkapan,
Peralatan &
Pemeliharaan
Rutin
Rumah Tangga



Kesehatan



Transportasi



Informasi,
Komunikasi &
Jasa Keuangan



Rekreasi,
Olahraga &
Budaya



Pendidikan



Penyediaan
Makanan &
Minuman/
Restoran



Perawatan
Pribadi &
Jasa Lainnya

5,07

0,13

-0,23

-0,06

-0,01

0,07

-0,06

0,08

0,03

0,03

0,04

Gambar 1. Andil inflasi menurut kelompok pengeluaran tahun 2024 (BPS, 2024)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memotret dan mengeksplorasi sesuatu yang secara keseluruhan, luas dan mendalam diteliti, luas. Data dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan ini, selanjutnya diintegrasikan menjadi sebuah gambaran yang jelas dan terarah menyangkut masalah yang diteliti. Menurut Moleong (2007) bahwa data penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata tertulis, atau gambar, dan bukan berupa angka-angka. Sedangkan, Penelitian kualitatif adalah proses penyaringan data secara apa adanya dari data yang dikumpulkan dalam upaya untuk menginvestigasi dan memahami

suatu fenomena. Penjelasan tentang fenomena dengan metode ini akan lebih deskriptif. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen. Oleh karena itu, penulis mencari literatur atau dokumen seperti jurnal dan buku sebagai sumber data penelitian (Adlini *et al.* 2022).

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan secara studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan dengan objek yang diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh kesimpulan akhir bagaimana bentuk mitigasi pengendalian inflasi melalui penjagaan ketersediaan pasokan bahan pangan lokal oleh Bank Indonesia melalui kebijakan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Berdasarkan studi literatur yang telah dikumpulkan dan perpaduan data dari beberapa instansi terkait di Provinsi Papua Pegunungan sebagai sumber data sekunder, maka alternatif solusi dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Papua Pegunungan adalah penjagaan ketersediaan pasokan komoditas bahan pangan untuk menghindari terjadinya kelangkaan komoditas pangan dan fluktuasi harga pasar.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator dalam pencapaian ketahanan pangan, khususnya dalam hal penyediaan bahan pangan untuk konsumsi pangan baik pada tingkat individu, rumah tangga, ataupun masyarakat (Ikmaludin *et al.* 2018). Karena pentingnya pangan bagi masyarakat, pemerintah akan terus mengantisipasi dan memitigasi kenaikan harga kelompok pangan melalui berbagai kebijakan untuk memastikan pasokan cukup dan harga tetap terjangkau. Diketahui bahwa, pembangunan ketahanan pangan memerlukan perencanaan yang strategis sehingga kebijakan yang dijalankan akan tepat sasaran (Wijaya *et al.* 2022).

Pemerintah secara konsisten berusaha memastikan bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *shock absorber* dapat berfungsi dengan baik untuk mengontrol inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga komoditas pangan melalui peningkatan produksi untuk tetap aman sehingga tidak ada pilihan ke produk lain selain produk di pasar tradisional, serta menjaga agar pemulihan ekonomi semakin menguat. Untuk menjaga stabilitas produksi komoditas bahan pangan dibutuhkan adanya kerja sama dengan pemerintah terutama Dinas Pertanian dalam memberikan pembinaan dan pembinaan dalam penanganan budidaya komoditas bahan pangan terjadwal dan bersifat tumpang sari sehingga dapat meminimalisir tingkat serangan hama dan penyakit akibat tingkat homogenitas tanaman yang dibudidayakan secara serentak tanpa mengatur waktu tanam.

Pemerintah memegang peranan penting dan berdampak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan berbangsa yang lebih luas. Pengawasan dan tata kelola yang efektif sangat penting bagi kemajuan perekonomian bangsa (Alfianti *et al.* 2024). Pemerintah harus mendekati pengambilan keputusan dengan sangat cermat,

karena konsekuensi kebijakan terhadap masyarakat memerlukan pertimbangan yang mendalam dari perspektif konsumen dan produsen (Nugraha *et al.* 2024). Selain itu, pemerintah juga wajib memberlakukan kebijakan pengendalian harga yang bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen, yang sekaligus merupakan bagian dari memitigasi laju inflasi. Hal ini dicapai melalui subsidi yang diberikan kepada petani yang memproduksi hasil tanaman yang terus berkembang, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka dibandingkan dengan barang impor yang dijual di pasar tradisional di ibu kota provinsi (Rawung *et al.* 2024). Selanjutnya, pemerintah juga wajib mengatur pasar yang menjadi tempat berlangsungnya proses jual beli dengan memperhatikan rantai pemasaran yang banyak melibatkan sistem pemasaran tidak langsung yang merugikan petani dan membuat harga jual melonjak.

Dengan inflasi, pengendalian harga dan subsidi yang diberikan pada kelompok bahan makanan dan barang lain yang diperlukan sehari-hari akan menjadi lebih penting. Keberadaan pasokan barang dalam jangka panjang dapat diatur harganya, yang pada negara-negara berkembang, subsidi biasanya menyebabkan beban pada anggaran pemerintah (Wati dan Azis 2024). Diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga makanan pokok. Ini akan melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, langkah-langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi, seperti meningkatkan subsidi dan memberikan bantuan sosial, hanyalah solusi jangka pendek. Pemerintah harus mencari metode yang memiliki efek jangka panjang untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah harus memprioritaskan mewujudkan kemandirian pangan dan energi.

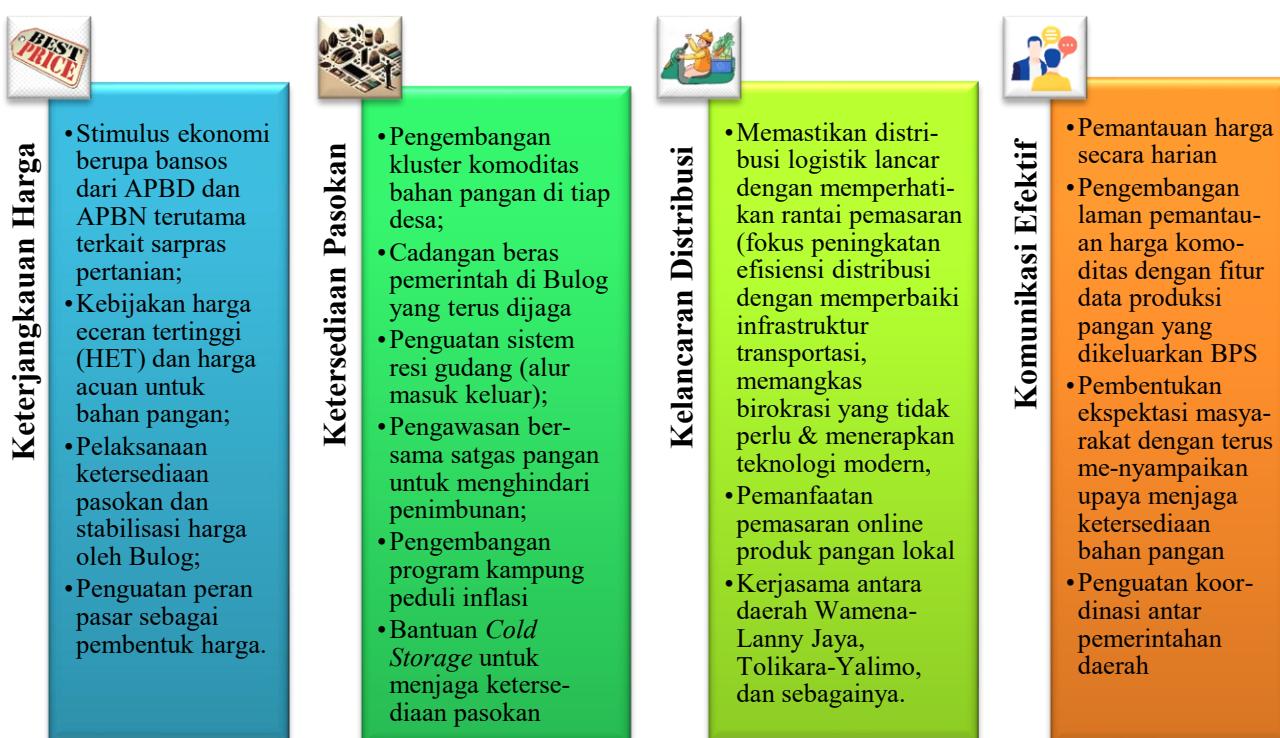
Menurut Aji dan Mukri (2020), dapat juga dilakukan dengan penjabaran langkah antisipasi secara ringkas melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Pengimplementasian 4K dapat dipandu oleh Tim Pengendali Inflasi Pangan Daerah (TPID) yang salah satunya adalah Bank Indonesia Provinsi Papua Pegunungan. Upaya penanggulangan inflasi di daerah dilakukan dengan kolaborasi antara Bank Indonesia provinsi dengan instansi terkait serta akademisi (Marina *et al.* 2021).

Mitigasi Pengendalian Laju Inflasi Papua Pegunungan Melalui Ketersediaan Komoditas Bahan Pangan

Penguatan pengendalian inflasi di Provinsi Papua Pegunungan dapat dimaksimalkan salah satunya dengan memastikan ketersediaan pasokan diantaranya menjamin ketersediaan beras dari Bulog di pasar utama, penentuan jadwal tanam komoditas bahan pangan tanpa sistem pindah tanam atau dengan bantuan pemanfaatan pupuk organik yang sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal atau dikatakan melalui pengendalian produksi (perencanaan produksi dan permintaan atau prediksi) permintaan di masa depan untuk produsen mengetahui kapasitas produksi mereka (Marina dan Lestari 2017). Selain itu, upaya menuju kemandirian beras menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pangan pada negara lain, namun ini merupakan tantangan yang berat. Kebutuhan lahan untuk pembangunan menyebabkan kekurangnya lahan pertanian. Kebijakan perlindungan lahan sawah yang ada dan peningkatan produksi padi menjadi sangat strategis dalam sistem pangan, karena mencetak lahan pangan baru dihadapkan pada berbagai kendala (Bondansari *et al.* 2024). Selain itu, pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) juga dapat dilakukan untuk cadangan beras dan *volatile food* lainnya.

Cadangan fisik maupun anggaran ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penanaman komoditas bahan pangan berupa waktu tanam komoditas yang dibudidayakan kemudian kerja sama antar klaster pangan binaan melalui dinas pertanian atau pada tiap kelompok tani yang sudah terbentuk, meningkatkan produktivitas dengan perluasan implementasi inovasi, dan optimalisasi teknologi penyimpanan komoditas.

Langkah strategi tersebut juga dapat dimaksimalkan dengan melakukan Gerakan Optimalisasi Kampung Peduli Inflasi dan Gerakan Stop Membeli Komoditas Pangan dari luar Provinsi Papua Pegunungan sebagai solusi ketahanan pangan rumah tangga digambarkan Gambar 2. Kemudian, pihak perbankan membantu petani mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnis mereka dan membantu pelaku pasar dan *stakeholder* menjaga harga dan memenuhi rantai pasokan. Sebagai bukti pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi, untuk menggali kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas dalam manajemen kapasitas produksi, manajemen rantai pasokan (SCM) memainkan peran penting dalam rantai pasokan (Marina 2019).



Gambar 2. Gambaran program strategis pengendalian inflasi

Secara ringkas, kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan harga pangan telah menunjukkan kemajuan penting dalam

membangun stabilitas harga dan meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan efektivitasnya, sangat penting untuk lebih fokus

pada implementasi praktis dan mencapai keseimbangan yang harmonis antara kepentingan konsumen dan badan usaha. Pemerintah diharapkan untuk terus melakukan pengawasan dan penilaian terhadap metode ini, sambil juga mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatur harga pangan agar ketersediaan komoditas bahan pangan.

Dampak kebijakan pengendalian harga pangan terhadap daya beli masyarakat dapat sangat signifikan. Kebijakan ini sering kali diterapkan untuk menstabilkan harga pangan dan mencegah inflasi yang tidak terkendali, sehingga masyarakat, terutama golongan berpendapatan rendah, tetap mampu membeli kebutuhan pokok mereka. Dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau, daya beli masyarakat meningkat karena mereka tidak perlu mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pangan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi tekanan ekonomi pada rumah tangga miskin, memungkinkan mereka untuk membelanjakan uang mereka pada kebutuhan lain seperti sekolah dan kesehatan, yang juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, kebijakan pengendalian harga juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti distorsi pasar, penurunan insentif bagi produsen, dan potensi kelangkaan barang jika harga yang ditetapkan terlalu rendah untuk menutupi biaya produksi.

Harapan para penjual dan konsumen terhadap kebijakan ini di masa mendatang adalah agar kebijakan tersebut lebih konsisten dan diperbaiki pelaksanaannya. Para pedagang berharap adanya subsidi untuk membantu mereka menghadapi biaya operasional dan dukungan agar harga bahan baku tetap terjangkau. Sementara itu, konsumen menginginkan pengawasan yang lebih ketat agar kualitas produk tetap baik dan harga pangan tidak melonjak tinggi. Saran tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga kebijakan ini bermanfaat secara maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat.

Langkah mitigasi pengendalian inflasi ini dapat dilakukan melalui digitalisasi pertanian, yang diketahui penting untuk ketahanan pangan suatu daerah. Digitalisasi pertanian adalah perubahan mendalam yang mengubah lanskap pertanian modern (Septian *et al.* 2025). Hal ini merupakan revolusi yang terus berkembang dengan dampak

signifikan terhadap seluruh rantai produksi dan konsumsi pangan. Salah satu manfaat utama digitalisasi pertanian adalah kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data pertanian dengan lebih baik, termasuk informasi tentang cuaca, kondisi tanah, dan hasil pertanian. Dengan akses yang lebih baik ke data ini, petani dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola pertanian mereka (Kaswanto *et al.* 2021; Sjaf *et al.* 2021; Azis dan Suryana 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa harga komoditas pangan strategis, termasuk beras, cabai, dan bubuk kopi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap angka inflasi di Provinsi Papua Pegunungan. Komoditas-komoditas ini dapat dianggap sebagai penggerak utama inflasi di Provinsi Papua Pegunungan, maka pemerintah dapat membuat kebijakan dalam pengendalian inflasi yaitu dengan cara menjaga ketersediaan komoditas pangan yang menjadi *leading indicators* tersebut dan menjaga pasokannya tersedia di masyarakat khususnya pada waktu dimana terjadi lonjakan harga seperti musim paceklik ataupun menjelang hari besar keagamaan. Untuk itu mitigasi pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kluster komoditas bahan pangan di tiap desa, menjaga kestabilan cadangan beras pemerintah di Bulog, melakukan pengendalian produksi (*forecasting*) yang dapat dijadikan referensi penanaman komoditas bahan pangan berupa waktu tanam komoditas yang dibudidayakan, bekerja sama antar klaster pangan binaan melalui dinas pertanian atau pada tiap kelompok tani yang sudah terbentuk, dan meningkatkan produktivitas dengan perluasan implementasi inovasi, serta optimalisasi teknologi penyimpanan komoditas. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pengawasan bersama satgas pangan untuk menghindari penimbunan, menentukan standar harga jual produsen di pasar dan pengembangan program kampung peduli Inflasi dan juga bantuan *Cold Storage* untuk menjaga ketersediaan pasokan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini MN, Dinda AH, Yulinda S, Chotimah O, Merliyana SJ. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.471>.
- Aji AM, Mukri SG. 2020. Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami

Mitigasi Pengendalian Laju Inflasi Papua Pegunungan Melalui Ketersediaan Komoditas Bahan Pangan

Mengatasi Inflasi). Edisi Revisi. Deepublish.

Alfianti S, Nurrika RP, Astuti U, Habibah MY, Shudur D, Triiswanto. 2024. Fungsi Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2(5): 90-93. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.424>.

Azis A, Suryana EA. 2023. Komparasi dan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pertanian: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 10(3): 179-198. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i1.62166>.

Bondansari, Widiatmaka, Machfud, Munibah K, Ambarwulan W. 2024. Kebijakan Menuju Kemandirian Beras di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(1): 33-45. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v11i1.53470>.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Berita Resmi Statistik, No. 150/08/94/2024: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Pegunungan Agustus 2024. www.bps.go.id

Ikmaludin, Kusumah C, Amirudin S. 2018. Tipologi Sistem Budidaya Pertanian dan Keberlanjutan Ketersediaan Pangan pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 5(1): 14-26. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v5i1.2875>.

Kaswanto RL, Aurora RM, Yusri D, Sjaf S, Barus S. 2021. Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Analisis Kebijakan Pertanian* 19(2): 189-205. <https://doi.org/10.21082/akp.v19n2.2021.189-205>.

Marina I, Andayani SA, Dinar, Dani U, Sumantri K. 2021. Pendampingan Program Pengendalian Inflasi Daerah pada Klaster Cabai Merah. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3): 775-779. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i3.1199>.

Marina I, Lestari DA. 2017. Pentingnya Data Deret Waktu dalam Melakukan Perencanaan Produksi (*the Importance of time Series Data in Production Planning*).

Marina I. 2019. Model Kapasitas Produksi Tomat di Sentra Produksi Kabupaten Majalengka.

Agrivet: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian dan Peternakan (Journal of Agricultural Sciences and Veteriner) 7(1): 19-26.

Moleong IJ. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nugraha, Ryan, Varlyta CR, Judijanto L, Adiwijaya S, Suryahani I, Murwani IA, Sopiana Y, Boari Y, Kartika T, Fatmah F. 2024. Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Rawung SS, Rumagit MCN, Supriyanto S. 2024. Buku Ajar Ekonomi Publik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Septian DE, Kaswanto RL, Arifin HS. 2025. Kontribusi Jasa Lanskap Agroforestri Sebagai Usaha Peningkatan Resiliensi Ekosistem terhadap Tekanan Lingkungan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 12(1): 85-94. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i1.62705>.

Sjaf S, Kaswanto RL, Hidayat NK, Barlan ZA, Elson L, Sampean S, Gunadi H. 2021. Measuring Achievement of Sustainable Development Goals in Rural Area: A Case Study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9(2). <https://doi.org/10.22500/9202133896>.

[UU] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Wati NAR, Azis JA. 2024. Strategi Pengendalian Inflasi Untuk Stabilitas Harga Melalui Kebijakan Moneter Perspektif Umer Chapra. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10(2): 284-298. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1557>.

Wijaya O, Juniarwan W, Widodo. 2022. Aternatif Kebijakan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Banyumas dengan Pendekatan Cluster Analysis. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 9(3): 133-148. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v9i3.32799>.

Yurianto H. 2020. Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal* 17(1): 12-33. <https://doi.org/10.30651/blc.v17i1.4179>.